

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Boediono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Harahap, M. Yahya. *Permasalahan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)
- Mahadi. *Falsafah Hukum*. (Bandung: Alumni, 2003)
- Natsir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Mulyadi Kartini. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. (Jakarta: Intermasa, 1995)

Untung, Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Andi, 2004)

B. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).

_____. *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

C. Jurnal

Siti Hapsah Isfardiyana. “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.